

Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Uni Eropa Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy* *Directive* (RED) II

Indonesia's Commercial Diplomacy Towards the European Union in Facing the Renewable Energy Directive (RED) II Policy

Feri Jaya Warsa Sembiring^{a,1}, Stivani Ismawira Sinambela^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hubungan Internasional UPU, Jl. K.L. Yos Sudarso KM 6.5 Tj. Mulia, Medan, 20241, Indonesia

ferijayasembiring@gmail.com¹, stivanii.sinambela@gmail.com²

ABSTRAK

Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) untuk mengurangi penggunaan CPO (*Crude Palm Oil*) Indonesia sebagai bahan bakar energi terbarukan dikarenakan CPO dianggap sebagai salah satu penyebab kerusakan di muka bumi. Indonesia menyikapi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan diplomasi komersial agar produk kelapa sawit Indonesia tetap bisa beredar di pasar Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya serta dampak diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa terkait adanya pelarangan penggunaan CPO di Eropa. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dengan adanya kebijakan RED II berdampak terhadap penurunan jumlah ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa dan membuat Indonesia melakukan diplomasi komersial serta mencari pasar baru ke berbagai negara di dunia untuk keberlangsungan industri CPO Indonesia.

Kata Kunci : Diplomasi Komersial, CPO, Indonesia, Uni Eropa

ABSTRACT

The European Union issued the *Renewable Energy Directive II* (RED II) policy to reduce the use of Indonesian CPO (*Crude Palm Oil*) as a renewable energy fuel because CPO is considered one of the causes of damage on the face of the earth. Indonesia responded to this policy by using a commercial diplomacy approach so that Indonesian palm oil products could still circulate in the European market. This research aims to find out the efforts and impact of Indonesia's commercial diplomacy towards the European Union regarding the ban on the use of CPO in Europe. This type of research uses qualitative research methods with secondary data sources in the form of literature studies. The research results show that the existence of the RED II policy has had an impact on reducing the number of Indonesian CPO exports to the European Union and has made Indonesia carry out commercial diplomacy and look for new markets in various countries in the world for the sustainability of the Indonesian CPO industry.

Keywords : Commercial Diplomacy, CPO, Indonesia, European Union

Info Artikel :

Disubmit: 10 Januari 2024

Direview: 05 Februari 2024`

Diterima :08 April 2024

Copyright © 2024 – Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, diplomasi komersial dijadikan prioritas Indonesia dalam menjalankan program politik luar negerinya. Salah satu contohnya adalah dengan cara melakukan perdagangan internasional lintas negara. Perdagangan internasional adalah kegiatan penting dilaksanakan oleh suatu negara agar memperoleh manfaat dari hasil transaksi tersebut. Sebuah negara dikatakan mempunyai keunggulan mutlak dibanding negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi produk yang tidak mampu dihasilkan oleh negara lain. Adam smith (1776) dikutip dari (Nuri Aslami, 2022). Dengan begitu negara

melaksanakan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil transaksi tersebut. Diplomasi komersial dipilih karena tepat guna dalam menjalin hubungan kerjasama terhadap negara lain. Hal tersebut dikarenakan *hardpower* tidak lagi hal yang tepat guna yang dapat diimplementasikan karena lebih banyak membawa dampak yang buruk. Permasalahan itu berkaitan dengan ketergantungan suatu negara dengan negara lain yang biasa disebut dengan interdependensi. Rosecrance (1986) dikutip dari jurnal (Triantama, 2020) menyebutkan bahwa ketergantungan ekonomi akan terjadi jika antar negara memiliki keterikatan satu sama lain. Negara akan menolak perang jika telah berada di kondisi yang memberi keuntungan serta manfaat.

CPO mempunyai angka produksi yang lebih daripada minyak nabati lain, menghasilkan pemasukan untuk negara, substitusi bahan dasar fosil, minyak nabati yang telah diuji kelayakannya sebelum digunakan, dan lainnya. (Holding & Adolina, 2023). Apabila dilihat dari banyaknya fungsi kelapa sawit berdampak juga kepada negara lain yang ingin ikut merasakan manfaat dari produk olahan tersebut. Tetapi banyak negara di dunia yang tidak mampumenghsilkan kelapa sawit karena keadaan geografis mereka tidak sesuai dengan habitat kelapa sawit. Selain itu limbah olahan kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, bahan bakar, serta pupuk kompos, dan lainnya. Indonesia menjadi negara produsen sawit terbesar di dunia memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dikarenakan perekonomian mereka bergantung dari bidang kelapa sawit dan hal itu juga berperan dalam permasalahan kemiskinan Indonesia. (Permatasari, 2022).

Industri kelapa sawit berkontribusi bagi perekonomian Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai Negara produsen serta eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. (Alfianisa, 2021). Karena hal tersebut banyak negara yang merasa dirugikan oleh minyak kelapa sawit Indonesia yang membuat Indonesia mendapat sorotan serta menerima perlakuan tidak mengenakan dari UE. (Pranggadia L.A, 2021). UE melakukan kampanye hitam (*Black Campaign*) lewat media yang menyebutkan bahwa CPO merusak lingkungan dan salah satu penyebab kerusakan di bumi. (Ardiansyah & Dra. Christy Damayanti, M.Si. Drs. GPH Dipokusuma, 1967). Permasalahan itu diduga karena adanya kompetisi perdagangan yang tidak ingin CPO lebih mendominasi daripada minyak nabati hasil produksi mereka seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, dsb. (Pradhana, 2020).

Hasil produksi minyak kelapa sawit lebih banyak dijual ke beberapa negara di dunia, seperti Uni Eropa. Tetapi kondisi sekarang Indonesia malah mengalami hambatan ekspor minyak kelapa sawit ke UE. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan RED (*Renewable Energy Directive*) II oleh UE. Bahkan UE menyatakan tidak akan lagi memakai biodiesel yang bahan dasarnya kelapa sawit yang mana program tersebut mendiskriminasi CPO Indonesia (Wikansari et al., n.d.). UE menyebutkan bahwa kelapa sawit menyumbang pengaruh tidak baik pada lingkungan dan jadi salah satu penyebab kerusakan di dunia. Tetapi Indonesia menentang persoalan tersebut, dengan melakukan bermacam cara untuk memberikan bukti bahwa CPO tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh UE. Bermacam cara yang dilakukan oleh Indonesia selama menghadapi ekspor minyak kelapa sawit untuk menangani kebijakan RED II yaitu dengan menerapkan aktivitas diplomasi komersial dengan harapan mampu memberikan kepada Uni Eropa untuk dapat meninjau kembali kebijakan yang telah mereka sepakati. (Nyoman & Lorensia, 2022).

Berdasarkan pejabaran diatas didapat rumusan masalah yaitu bagaimana upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa melalui *Joint Working Group*. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa mengenai adanya pelarangan penggunaan CPO melalui *Joint Working Group*. Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan kepada penulis maupun para pembaca khususnya mengenai diplomasi komersial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep diplomasi komersial. Diplomasi merupakan aktivitas politik yang dilakukan oleh suatu pihak yang bertujuan untuk memperoleh sasaran yang dijadikan tujuan dan mempertahankannya kepentingannya masing-masing lewat lobi dengan tidak menggunakan kekerasan, propaganda, dan juga hukum. G.R. Berridge (2010). Aktor yang melakukan diplomasi yaitu terdiri atas aktor negara dan aktor non negara. Aktor negara dilakukan oleh pemerintah, sedangkan aktor non negara dilakukan oleh masyarakat suatu bangsa, kelompok bisnis, media, dan lain sebagainya. Diplomasi komersial yaitu penerapan kegiatan secara resmi oleh pemerintah terhadap negara lain dengan cara menerapkan kepandaian dan taktik guna mencapai kepentingan dalam negerinya. Satow (1957) dikutip dari jurnal (Nurika, 2017). Para aktor melakukan praktik diplomasi tentunya memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Lee (2004) dalam jurnal (Putri, 2020) mengatakan bahwasannya diplomasi komersial bisa menghasilkan keuntungan komersial melalui kegiatan ekspor dan impor, menarik investor untuk melakukan investasi, serta mendorong manfaat pertukaran teknologi. Sedangkan Reuvers & Ruel (2012) dikutip dari (WULANDARI & Suryadipura, 2021) mengatakan bahwasannya diplomasi komersial digunakan sebagai bantuan untuk meningkatkan aktivitas komersial berupa aktivitas ekspor dan propaganda FDI dengan tujuan tercapainya stabilitas ekonomi, kesejahteraan, dan peningkatan keuntungan negara. Diplomasi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis aktivitas, yaitu komunikasi, advokasi, koordinasi, serta logistik.

Diplomasi komersial sering digunakan citra negara yang bernegosiasi, dukungan ekspor, pemasaran, riset, dan publikasi. Diplomasi komersial sejatinya memiliki makna yang sama dengan diplomasi yang telah dijelaskan diatas hanya saja membawa kepentingan komersial atau ekonomi didalamnya. Kepentingan komersial yang dimaksud adalah dalam hal ekspor dan impor, menarik investor untuk melakukan investasi, dan lain sebagainya. Diplomasi komersial adalah bagian dari diplomasi ekonomi yang berfokus pada empat kegiatan utama yaitu promosi dagang, membuat perjanjian dagang, membahas isu perdagangan dengan banyak negara, serta promosi investasi (*foreign direct investment*). Pada era saat ini Indonesia memprioritaskan salah satu kebijakan luar negerinya dengan fokus pada diplomasi komersial dan perdagangan dengan harapan dapat meningkatkan ekspor komoditas non migas negara. Dengan adanya tujuan strategis tersebut diharapkan Indonesia mampu menjadi negara yang unggul dalam hal praktik diplomasi ekonomi dibandingkan dengan negara lain.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memfokuskan pada penulisan kata-kata deskriptif disbanding dengan menggunakan angka. Dalam metode penelitian ini lebih ditekankan pada proses pelaksanaan penelitian itu sendiri bukan berdasarkan dari hasil. (Salim, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi. Teknik tersebut merupakan teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data sedalam mungkin. Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang penulis dapat dari jurnal, buku, artikel, website, serta dokumen yang relevan terkait penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep diplomasi komersial. Diplomasi merupakan aktivitas politik yang dilakukan oleh suatu pihak yang bertujuan untuk memperoleh sasaran yang dijadikan tujuan dan mempertahankannya kepentingannya masing-masing lewat lobi dengan tidak menggunakan kekerasan, propaganda, dan juga hukum. G.R. Berridge (2010). Aktor yang

melakukan diplomasi yaitu terdiri atas aktor negara dan aktor non negara. Aktor negara dilakukan oleh pemerintah, sedangkan aktor non negara dilakukan oleh masyarakat suatu bangsa, kelompok bisnis, media, dan lain sebagainya. Diplomasi komersial yaitu penerapan kegiatan secara resmi oleh pemerintah terhadap negara lain dengan cara menerapkan kepandaian dan taktik guna mencapai kepentingan dalam negerinya. Satow (1957) dikutip dari jurnal (Nurika, 2017). Para aktor melakukan praktik diplomasi tentunya memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Lee (2004) dalam jurnal (Putri, 2020) mengatakan bahwasannya diplomasi komersial bisa menghasilkan keuntungan komersial melalui kegiatan ekspor dan impor, menarik investor untuk melakukan investasi, serta mendorong manfaat pertukaran teknologi. Sedangkan Reuvers & Ruel (2012) dikutip dari (WULANDARI & Suryadipura, 2021) mengatakan bahwasannya diplomasi komersial digunakan sebagai bantuan untuk meningkatkan aktivitas komersial berupa aktivitas ekspor dan propaganda FDI dengan tujuan tercapainya stabilitas ekonomi, kesejahteraan, dan peningkatan keuntungan negara. Diplomasi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis aktivitas, yaitu komunikasi, advokasi, koordinasi, serta logistik.

Diplomasi komersial sering digunakan citra negara yang bernegosiasi, dukungan ekspor, pemasaran, riset, dan publikasi. Diplomasi komersial sejatinya memiliki makna yang sama dengan diplomasi yang telah dijelaskan diatas hanya saja membawa kepentingan komersial atau ekonomi didalamnya. Kepentingan komersial yang dimaksud adalah dalam hal ekspor dan impor, menarik investor untuk melakukan investasi, dan lain sebagainya. Diplomasi komersial adalah bagian dari diplomasi ekonomi yang berfokus pada empat kegiatan utama yaitu promosi dagang, membuat perjanjian dagang, membahas isu perdagangan dengan banyak negara, serta promosi investasi (*foreign direct investment*). Pada era saat ini Indonesia memprioritaskan salah satu kebijakan luar negerinya dengan fokus pada diplomasi komersial dan perdagangan dengan harapan dapat meningkatkan ekspor komoditas non migas negara. Dengan adanya tujuan strategis tersebut diharapkan Indonesia mampu menjadi negara yang unggul dalam hal praktik diplomasi ekonomi dibandingkan dengan negara lain.

Renewable Energy Directive (RED) adalah kebijakan yang membahas tentang penggunaan *biofuel* yang berasal dari minyak nabati kelapa sawit. Awalnya RED dibuat pada tahun 2003 yang meregulasi perubahan sumber energi fosil menjadi sumber energi terbarukan. Selanjutnya pada tahun 2009 direvisi menjadi RED II yang mengatur tentang bagaimana sumber *biofuel* yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian pada tahun 2018 draf RED diamandemen untuk melarang menggunakan CPO sebagai *biofuel* di Eropa yang telah disetujui oleh parlemen Eropa. Pada intinya Uni Eropa berencana mengurangi bahkan menghapus penggunaan minyak nabati kelapa sawit dengan tujuan untuk mengurangi perubahan iklim. Dengan disahkannya rancangan tersebut berarti RED II telah dipublikasikan di jurnal resmi Uni Eropa dan berlaku 20 hari setelah rancangan tersebut disahkan. Negara anggota serta Komisi Eropa akan terus meregulasi kebijakan energi terbarukan pada dekade yang akan datang untuk mencapai target energi terbarukan dalam bidang transportasi serta tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dan membatasi penggunaan minyak kelapa sawit. (Saragih & Rahayu, 2022).

Dengan dikeluarkannya *Renewable Energy Directive II* (RED II) oleh Uni Eropa tentu memiliki pengaruh buruk terhadap produksi kelapa sawit Indonesia terkait jumlah produksi dan ekspor CPO, hal tersebut dikarenakan Indonesia harus kehilangan salah satu pasar terbesarnya yaitu Uni Eropa. Setelah adanya kebijakan tersebut nilai ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa menurun dari 2018 sampai dengan 2022 serta memberikan pengaruh terhadap pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri kelapa sawit tersebut. Penurunan jumlah ekspor tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Nama Negara	2018	2019	2020	2021	2022
India	6 346,2	4 576,6	4 568,7	3 088,7	4 996,3
Tiongkok	4 166,5	5 791,1	4 390,5	4 703,1	3.836,8
Pakistan	2 458,5	2 215,9	2 487,0	2 674,3	2 805,0
Belanda	1 161,1	914,9	682,8	567,0	529,4
AS	1 112,8	1 189,0	1 123,7	1 640,2	1 789,6
Spanyol	1 168,6	1 078,8	1 135,9	992,8	626,5
Mesir	936,9	1 095,1	970,9	1 035,3	678,2
Bangladesh	1 402,3	1 351,5	1 026,6	1 319,4	1 322,4
Italia	888,9	751,3	944,7	622,7	595,7
Singapura	424,5	580,3	360,6	55,7	107,6
Lainnya	9 236,1	10 003,4	9 634,7	10 290,8	8 933,1

Gambar 1.1. Ekspor CPO Indonesia Menurut Negara Tujuan 2018- 2022

Sumber : BPS 2022

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia mengambil langkah dalam menghadapi kebijakan RED II dengan cara yang damai melalui pendekatan soft diplomasi demi melindungi kepentingan ekonomi Indonesia. Adapun diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lebih berfokus pada diplomasi komersial seperti aktivitas promosi komoditas perdagangan CPO yang berkesinambungan di pasar dunia untuk memberikan pemahaman serta kesadaran publik dan membangun citra positif bahwasannya minyak kelapa sawit tidaklah sama seperti yang dituduhkan dalam RED II yang mengatakan bahwa minyak kelapa sawit berdampak negatif. Pada dasarnya diplomasi komersial mengacu pada negosiasi perdagangan dan penyelesaian sengketa perdagangan serta aktivitas pendukung bisnis mengacu pada *public relation*. (Nurika, 2017).

Presiden Indonesia sering menekankan kepada para diplomat Indonesia untuk melakukan diplomasi komersial dengan tujuan meningkatkan promosi perdagangan. Indonesia gencar melakukan diplomasi komersial lewat pertemuan dengan pemerintah Uni Eropa untuk bernegosiasi terkait narasi positif tentang kelapa sawit.

Hubungan diplomasi komersial antara Indonesia dan Uni Eropa terjalin karena kepentingan kedua belah pihak. Dengan adanya kerjasama bilateral tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak. Kerjasama bilateral yaitu bagian dari kepentingan dua belah pihak yang bertemu bertemu dan menghasilkan suatu kesepakatan bersama, mempromosikan serta memenuhi harapan bahwa kebijakan yang telah disepakati dapat mencapai tujuannya masing-masing. Holsti (1987) dikutip dari jurnal (Pratiwi, 2021). Dalam proses hubungan bilateral dilandasi oleh tiga hal, yaitu : memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam jurnal (Avivi & Siagian, 2020) Rudy (2002:127) mengatakan bahwasannya kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang meliputi bidang politik,

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia mengambil langkah dalam menghadapi kebijakan RED II dengan cara yang damai melalui pendekatan soft diplomasi demi melindungi kepentingan ekonomi Indonesia. Adapun diplomasi yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia lebih berfokus pada diplomasi komersial seperti aktivitas promosi komoditas perdagangan CPO yang berkesinambungan di pasar dunia untuk memberikan pemahaman serta kesadaran publik dan membangun citra positif bahwasannya minyak kelapa sawit tidaklah sama seperti yang dituduhkan dalam RED II yang mengatakan bahwa minyak kelapa sawit berdampak negatif. Pada dasarnya diplomasi komersial mengacu pada negosiasi perdagangan dan penyelesaian sengketa perdagangan serta aktivitas pendukung bisnis mengacu pada *public relation*. (Nurika, 2017).

Presiden Indonesia sering menekankan kepada para diplomat Indonesia untuk melakukan diplomasi komersial dengan tujuan meningkatkan promosi perdagangan. Indonesia gencar melakukan diplomasi komersial lewat pertemuan dengan pemerintah Uni Eropa untuk bernegosiasi terkait narasi positif tentang kelapa sawit.

Hubungan diplomasi komersial antara Indonesia dan Uni Eropa terjalin karena kepentingan kedua belah pihak. Dengan adanya kerjasama bilateral tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak. Kerjasama bilateral yaitu bagian dari kepentingan dua belah pihak yang bertemu bertemu dan menghasilkan suatu kesepakatan bersama, mempromosikan serta memenuhi harapan bahwa kebijakan yang telah disepakati dapat mencapai tujuannya masing-masing. Holsti (1987) dikutip dari jurnal (Pratiwi, 2021). Dalam proses hubungan bilateral dilandasi oleh tiga hal, yaitu : memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam jurnal (Avivi & Siagian, 2020) Rudy (2002:127) mengatakan bahwasannya kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang meliputi bidang politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan antar dua belah pihak yang harus diraih sesuai dengan kepentingan nasional suatu bangsa.). Kishan S. Rana (2002) dalam jurnal (Dewani, 2023) menyebutkan bahwasannya dalam kerjasama bilateral menggunakan konsep utama yaitu suatu negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapat keuntungan maksimal dan satu-satunya cara yaitu dengan menjalin hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia mengirim perwakilan ke beberapa negara Uni Eropa seperti Belanda, Italia, dan Spanyol untuk melakukan kunjungan resmi dengan tujuan untuk promosi perdagangan produk kelapa sawit yang berkelanjutan. Promosi tersebut juga untuk mengubah narasi buruk tentang kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa dengan memberikan edukasi akan kegunaan CPO sebagai keperluan pangan serta sumber energi terbarukan. Kebijakan RED II telah membuat produk kelapa sawit Indonesia mendapat citra negatif di pasar internasional sehingga Indonesia perlu melakukan kebijakan terkait persoalan tersebut untuk mengantisipasi jangan sampai berita tidak baik tentang sawit yang beredar menjadi hal yang dibenarkan. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan dampak kepada Uni Eropa agar mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah mereka hasilkan yaitu RED II. Peran diplomasi komersial begitu penting dalam meningkatkan perdagangan internasional serta menjadi solusi dalam konflik global. Maksud dari adanya diplomasi komersial yaitu untuk menjelaskan negara untuk mempromosikan produk perdagangannya di pasar global. Diplomasi komersial dijalankan langsung oleh pihak yang berkepentingan sehingga lebih akurat karena sifatnya yang tidak formal sehingga komunikasi dapat lebih mendalam dan bisa mengurangi ketegangan saat bertukar informasi dan bernegosiasi. (Wulandari & Suryadipura, 2021).

A. Peran Aktif Dalam KTT

1. Melakukan perundingan dagang melalui IEU-CEPA. IEU-CEPA merupakan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia melakukan perundingan dagang dengan Uni Eropa pada bulan Desember 2019 yang diadakan di Brussel, Belgia. Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan terkait rumor kelapa sawit setelah adanya kebijakan RED II. Kemudian delegasi Uni Eropa menyampaikan kepada Indonesia bahwasannya Uni Eropa mengerti akan betapa pentingnya industri kelapa sawit terhadap Indonesia. Selain itu kabinet Uni Eropa yang baru mengatakan hendak berfokus pada agenda hijau baik dari internal maupun eksternal.

2. Pertemuan tingkat menteri ASEAN-UE. Pertemuan antar menteri ASEAN-UE ke 23 diadakan secara online pada Desember 2020. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 10 Menteri Luar Negeri ASEAN dan 23 Menteri Luar Negeri negara Uni Eropa. Pertemuan virtual tersebut menjadi momentum yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk berdialog terkait isu minyak kelapa sawit. Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwasanya CPO Indonesia yang sudah mengutamakan lingkungan agar tetap lestari. Hal tersebut bisa dibuktikan dari jumlah lahan yang lebih efisien tepat guna yaitu sebesar 17 juta hektar, sedangkan minyak nabati lainnya menggunakan lahan yang lebih luas yaitu 277 juta hektar. Pertemuan tersebut mampu menghasilkan kerjasama yang bernama *Joint Working Group* yang mana berfokus pada membahas kesetaraan dan keadilan minyak nabati lainnya dengan minyak kelapa sawit.
3. Kiat Indonesia Melalui jalur *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan organisasi skala global yang mengatur perdagangan antar negara di dunia yang menjamin perdagangan berjalan dengan lancar dan sebebas mungkin sehingga bisa diakses oleh semua kepentingan. (Immara Nuur Alfianisa, 2021). Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa melanggar prinsip yang telah ditetapkan oleh WTO. UE justru malah mendiskriminasi dan melarang ekspor kelapa sawit Indonesia ke pasar Eropa. Pemerintah Indonesia merasa keberatan dengan adanya kebijakan Uni Eropa di berbagai forum. Selain itu Indonesia juga mengusulkan kepada UE untuk tidak melanjutkan kebijakan pemasangan label "bebas minyak sawit" (*palm oil free labelling*) di berbagai produk yang dilakukan perusahaan swasta di Uni Eropa. Dengan adanya kebijakan tersebut, Indonesia mengajukan permohonan pada Desember 2019 terhadap UE. Dalam permohonan tersebut, Indonesia mengusulkan agar Uni Eropa merubah kebijakan RED II dan *Delegated Regulation*. Walau kebijakan itu sempat ditolak pada pertemuan *Dispute Settlement Body* (DSB) tahun 2020, namun akhirnya Indonesia mengajukan permohonan kedua tentang kebijakan biofuel dan permohonan tersebut dikabulkan. Ada 18 negara yang bersedia ikut serta dalam proses ini, yaitu AS, Malaysia, Norwegia, Turki, Singapura, Thailand, Rusia, Jepang, Korea, India, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Kolombia, Kanada, Brasil dan Argentina. Rapat persiapan sidang pertama dilaksanakan pada 06 April 2021, yang dilakukan secara *hybrid* dikarenakan pandemi, dipimpin oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan dibuka oleh Wakil Menteri Perdagangan RI. Hasil pembahasan rapat tersebut, Wakil Menteri Perdagangan menegaskan bahwa Indonesia selalu konsisten terhadap kelapa sawit berkelanjutan, karena hal tersebut juga didukung berkat kerjasama Indonesia dengan Swiss dalam ekspor minyak kelapa sawit. Dalam WTO, Indonesia mengupayakan kepentingan nasionalnya, karena UE sudah melakukan larangan ekspor dan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit Indonesia tanpa dasar ilmiah, serta UE juga melanggar prinsip "*free and trade*" dalam WTO. Selain itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa langkah selanjutnya dalam melakukan promosi sawit tidak hanya secara eksternal namun juga akan secara internal. (Nyoman & Lorensia, 2022).

B. Ekspansi dan Promosi

1. Promosi kelapa sawit berkelanjutan oleh PT Paya Pinang. Salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Sumatra yang dikunjungi oleh Dubes Jerman untuk Indonesia pada bulan Februari 2018. (Nyoman & Lorensia, 2022). Direktur PT Paya Pinang Group mengajak Dubes Jerman mengunjungi dan memantau seperti apa perkebunan kelapa sawit dikelola. Selama mengunjungi Indonesia, perusahaan menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah minyak kelapa sawit Indonesia berjanji untuk menaikkan standarisasi pengelolaan kebun kelapa sawit agar sesuai dengan ISPO,

minyak kelapa sawit tidak akan menggunakan lahan baru tetapi menggunakan lahan yang sudah ada. Kemudian mengusulkan agar industri CPO mendapat perlakuan yang adil dan sama seperti minyak nabati yang lain. Penggunaan ISPO mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Duta Besar Jerman karena telah membuat aturan agar mengimplementasikan keberlanjutan industri kelapa sawit. Dubes Jerman juga menyampaikan dukungannya untuk memperlakukan secara adil terkait adanya kebijakan RED II. Hal tersebut berdampak pada pengurangan propaganda tidak baik di Eropa. Dubes Jerman juga memberikan saran agar terus berkomunikasi terkait industri CPO yang berkelanjutan dengan *stakeholder* sawit.

2. Kunjungan Dubes Negara-Negara Uni Eropa di Perusahaan Asian Agri, Jambi. Kementerian Luar Negeri menggandeng industri CPO Asian Agri melaksanakan Program Eksekutif. Kelapa Sawit pada 16 sampai 18 April 2019 untuk menyambut visitasi resmi Dubes negara anggota UE. Tujuan diadakannya program ini yaitu untuk menginformasikan yang valid pada perwakilan Uni Eropa tentang bagaimana kelapa sawit dikelola secara berkelanjutan di Indonesia. Pihak Uni Eropa juga diberikan fasilitas agar bisa memantau langsung kegiatan pengelolaan sawit berkelanjutan. Perusahaan Asian Agri menunjukkan langsung bagaimana kelapa sawit berkelanjutan dikelola mulai dari pembibitan sampai dengan berbentuk CPO. Dalam menjalankan industri kelapa sawit perusahaan menggunakan sertifikasi ISPO yang mana tentunya berfokus pada kelestarian lingkungan. Dubes Uni Eropa untuk Indonesia merespon dengan baik saat menyaksikan manajemen Asian Agri yang mampu memaksimalkan langkah penting yaitu jangka panjang kelangsungan industri serta lingkungan. Perwakilan Uni Eropa setuju jika Indonesia sudah memperoleh langkah yang penting dalam pengelolaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan perlu mempertahankannya.
3. Promosi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam pertunjukan Warsawa Humanitarian Polandia. Indonesia menghadiri acara pameran Warsawa Humanitarian di Polandia pada 11 sampai 13 Juni 2019. Indonesia mengangkat tema “Indonesia Sustainable Palm Oil, it’s Contributions to SDGs” yang bertujuan menyampaikan pada khalayak umum bahwa minyak kelapa sawit berkelanjutan Indonesia bisa membantu tercapainya SDGs. Indonesia memberi pemahaman kepada publik bahwasannya minyak kelapa sawit banyak digunakan pada produk dalam kehidupan. Selain itu Indonesia juga menyampaikan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, menciptakan masyarakat sejahtera, menciptakan lingkungan hidup yang lestari dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pameran tersebut Indonesia mendapat respon positif baik dari masyarakat lokal dan global. Polandia mengatakan bahwa banyak dari lingkungan yang rusak dan hutan yang gundul tidak harus dikaitkan dengan industri kelapa sawit. Dukungan Polandia juga dapat dilihat dari kunjungan resmi perwakilan Polish-Indonesia Parliamentary di kantor wakil DPR RI, Jakarta pada 24 Oktober 2019. Pertemuan tersebut menyepakati untuk meningkatkan investasi perdagangan antara Indonesia dan Polandia pada bidang kelapa sawit.
4. Promosi kelapa sawit berkelanjutan ISPO pada pertemuan Menlu Indonesia dengan Perwakilan UE di Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan pertemuan secara langsung dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri dan keamanan Uni Eropa yaitu Josep Borrell pada tanggal 2 Juni 2021 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang kerjasama di sektor ekonomi, penyelesaian bersama terkait covid 19 serta rumor kelapa sawit setelah dikeluarkan kebijakan RED II. Menlu Indonesia serius dalam menghasilkan kelapa sawit berkelanjutan dengan cara melakukan penguatan ISPO, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing CPO Indonesia di skala global. Selain itu Menlu Indonesia juga menyampaikan pentingnya kerjasama ekonomi serta perdagangan yang tidak diskriminatif, adil dan terbuka untuk membantu pemulihan ekonomi agar lebih cepat. Pada pertemuan tersebut Indonesia juga meminta supaya CPO Indonesia bisa diperlakukan secara adil dan dengan minyak nabati lainnya dan menghilangkan stigma negatif yang beredar. Permintaan tersebut direspon baik oleh UE terkait pengelolaan kelapa sawit yang produktif dan berkelanjutan yang

dimiliki produsen sawit Indonesia melewati ISPO. Pihak UE juga mengatakan bahwasanya mereka tidak melakukan pelarangan impor CPO Indonesia namun berkaitan dengan keberlanjutan yang harus diselesaikan bersama.

5. Melakukan Upaya Joint Campaign atau kampanye bersama antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. (Nyoman & Lorensia, 2022). Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Indonesia tetap menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia disusul oleh Malaysia, sehingga perlu adanya sosialisasi terkait penolakan minyak kelapa sawit, dengan begitu diharapkan dapat mempengaruhi voting di Pemerintahan Eropa, APEC serta WTO. Indonesia juga mempersiapkan pembentukan *Council of Palm Oil Producers* (CPOPC) guna menjalin kedudukan yang setara dengan penghasil minyak kelapa sawit, mencari pasar baru, memaksimalkan penggunaan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri, dan mengatur pasar yang sudah ada. Pertemuan Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia menjadi hal yang menarik untuk menjaga kestabilan pendistribusian minyak kelapa sawit dan sigap terhadap kampanye negatif minyak kelapa sawit. (Nyoman & Lorensia, 2022).

C. Meningkatkan Kerjasama Melalui Joint Working Group

1. Melakukan pertemuan resmi *Council Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Negara anggota CPOPC yaitu Indonesia, Kolombia, dan Malaysia melakukan pertemuan antar menteri ke 6 yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Februari 2019. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Menteri Industri Utama Malaysia, dan Kementerian Pertanian Kolombia. Pertemuan tersebut membahas tentang keberadaan kelapa sawit yang mendapat pembatasan ekspor ke Uni Eropa yang tertuang dalam kebijakan RED II. CPOPC menyampaikan rasa keberatan terhadap kebijakan RED II karena Uni Eropa menganggap tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang berdampak negatif. Kemudian pertemuan itu menghasilkan kesepakatan Joint Mission ke Uni Eropa pada April 2019 di Brussel, Belgia. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan keputusan Komisi Eropa yang berencana mengkaji ulang dan mempertimbangkan kebijakan RED II serta tahun 2023 akan merevisi terhadap konsep *Delegate Act*.
2. Kerjasama dengan Belanda terkait produksi sawit berkelanjutan. Pada sidang Majelis Umum PBB ke 74 di New York pada 2019 yang mana pada sela waktu dimanfaatkan oleh Indonesia dan Belanda terkait pengembangan produksi sawit yang berkelanjutan yang menghasilkan nota kesepahaman (MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan Sigrid Kaag Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda. Dari MoU tersebut Belanda berkomitmen mendorong kenaikan kelapa sawit Indonesia yang telah tersertifikasi ketika di ekspor ke Belanda ataupun ke pasar Eropa. Belanda sendiri tidak mendukung adanya kebijakan RED II untuk penggunaan biofuel melainkan mendukung CPO berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal tersebut timbul bersamaan dengan adanya pandangan dan anggapan negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia setelah adanya kebijakan RED II.
3. Kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Kerjasama ini yaitu kerjasama antara DPR RI dengan Uni Eropa yang dilakukan pada 13 April 2018 di Brussels, Belgia dengan tujuan untuk memperjuangkan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa. Perwakilan DPR RI menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan RED II yang telah menyebabkan rugi yang cukup berarti bagi pelaku bisnis industri maupun petani kelapa sawit.

Selain itu perwakilan DPR RI juga mengusulkan Parlemen Eropa terkait kebijakan RED II yang akan menghapus total terhadap produk biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit pada tahun 2030. Kemudian Parlemen Eropa menanggapi hal tersebut bahwasannya kebijakan RED II belum rampung keseluruhan dan masih dalam tahap perundingan dengan institusi Uni Eropa. Indonesia juga diminta supaya bisa menyampaikan data dan info yang akurat terkait kelapa sawit, perihal tersebut dikarenakan banyak rumor yang beredar mengatakan bahwasannya minyak kelapa sawit merupakan produk yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan.

4. Kunjungan Menko Maritim Ke Vatikan. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kenegaraan ke Vatikan dalam rangka merundingkan perdagangan CPO ke Eropa yang dibatasi dan memohon bantuan supaya CPO tidak terhambat masuk ke pasar Eropa. Pihak yang ditemui Indonesia yaitu Direktur Lembaga Kepausan Keadilan dan Perdamaian Vatikan, Kardinal Turkson. Pihak Vatikan akan membantu Indonesia untuk memberi fasilitas pertemuan internasional yang akan membahas diskriminasi kelapa sawit di Uni Eropa. Kemudian diadakan juga pertemuan di Urban University Roma, Italia yang membahas tema tentang Pemberantasan Kemiskinan Melalui Industri Perkebunan dan Pertanian guna Memperkuat Perdamaian dan Kemanusiaan. Pada acara konferensi tersebut Indonesia menjelaskan realita industri kelapa sawit yang telah ikut andil menyokong pertumbuhan ekonomi karena telah menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 19 juta tenaga kerja. Selain itu Indonesia berusaha membuat Vatikan yakin bahwasannya kelapa sawit bukanlah sebab dari adanya penggundulan hutan seperti yang disebutkan Uni Eropa. Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa selama ini diolah secara lestari dengan uji sertifikasi ISPO, berbeda dengan minyak nabati lainnya yang tidak memiliki sertifikasi. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu kesepakatan beberapa hal seperti tidak melakukan diskriminasi perdagangan dari setiap komoditas ataupun industri pertanian dan menyepakati bahwasannya industri kelapa sawit telah berperan penting terhadap pengentasan masalah kemiskinan.
5. Kesepakatan Dagang Indonesia dengan Swiss Terkait Minyak Kelapa Sawit. Referendum Swiss setuju untuk melakukan *free trade* atau perdagangan bebas dengan Indonesia terkait komoditas minyak sawit dengan hasil voting sebesar 51% pada Maret 2021. Hal tersebut meningkatkan hubungan bilateral antara Swiss dan Indonesia, seperti adanya poster beruang Swiss yang sedang memeluk harimau yang merupakan simbol satwa Indonesia. Perjanjian perdagangan ini pastinya akan menguntungkan bagi Swiss juga sebab akan membuka pasar baru yang menjanjikan bagi negaranya.
6. Negosiasi antara Indonesia dengan APEC. Pada pertemuan KTT, melakukan analisis tentang produk yang termasuk dalam jenis ramah dan tidak ramah lingkungan. Hasil diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu 54 produk ramah lingkungan. Namun, minyak sawit termasuk dalam kategori produk yang tidak ramah lingkungan, dikalahkan oleh bambu yang termasuk produk ramah lingkungan. Dari hasil analisis tentang kelapa sawit dan bamboo mempunyai beberapa kesamaan. Akan tetapi lahan sawit mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan bambu sebab tanaman sawit memiliki dahan yang lebih lebar. Penjelasan tersebut belum mampu membuat forum APEC menyetujui kelapa sawit sebagai produk ramah lingkungan sehingga diperlukan upaya yang lebih ekstra untuk menego para petinggi APEC untuk merubah keputusan terkait minyak kelapa sawit. Selain itu, perjanjian APEC berada di luar cakupan perjanjian WTO yang mengatur perdagangan dunia yang adil. Oleh sebab itu, diharapkan APEC mempertimbangkan kembali keputusannya. Berdasarkan kesepakatan tersebut para petinggi APEC memperoleh gambaran persaingan yang tinggi di bisnis minyak nabati berskala global, negosiasi bambu yang sukses, serta nasib pohon kelapa sawit Indonesia. (Nyoman & Lorensia, 2022).

D. Sertifikasi ISPO

ISPO atau *Indonesia Sustainable Palm Oil* adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara ekonomi, sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan sertifikasi ISPO yaitu rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan memberikan jaminan tertulis bahwa produk dan perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Tujuan adanya dari sertifikasi ISPO yaitu untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta membangun perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional, serta meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca. Adapun pihak yang terlibat dalam sertifikasi ISPO diantaranya adalah pelaku usaha yang meliputi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun sawit, Lembaga Sertifikasi, Komite Akreditasi Nasional, Komisi ISPO, dan Dewan Pengarah.(Sawit, n.d.).

E. Kampanye Sawit Baik

Berikut upaya pemerintah Indonesia dalam mengkampanyekan produk kelapa sawitnya :

1. Kampanye Positif

Indonesia termasuk negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang tersebar di 190 kabupaten di Indonesia dan sudah memperoleh dampak baik pada perekonomian daerah pusat. Sawit menjadi produk yang paling banyak menyumbang 42% dari total suplai minyak nabati dunia, pertumbuhan permintaan minyak nabati dunia mengalami kenaikan 8,5 juta metrik ton setiap tahun. Pihak BPD PKS juga mengajak beberapa narasumber lain yang akan menganalisis persoalan kampanye negatif sawit dari berbagai sudut pandang sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Pemerintah dan pelaku usaha sawit sudah mempromosikan dan melakukan kampanye sawit di Jepang. Beberapa kegiatan promosi yang sudah dilaksanakan yaitu bekerja sama dengan Trade Promotion Center (ITPC) di Osaka dengan melakukan aksi penggunaan produk turunan sawit.

2. Pelarangan Palm Oil Free

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan dengan tegas bahwa akan melakukan perlawanan terhadap kampanye hitam kelapa sawit Indonesia dengan mengawasi produk makanan. Kepala BPOM Penny Lukito juga menjelaskan, perlawanan yang akan dilakukan adalah memberikan larangan agar tidak menampilkan label Tanpa Mengandung Minyak sawit alias Palm Oil Free (POF). Bagi UMKM akan diberikan hukuman pembinaan dan bagi perusahaan atau produsen besar akan diberikan sanksi administratif dan produknya akan ditarik dari pasar. Namun, jika barangnya merupakan barang impor dan ilegal maka akan dikenakan sanksi pidana.

3. Pemanfaatan Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan

Pemerintah sedang mengusahakan adanya inovasi baru dalam pemanfaatan biomassa yang bertujuan untuk meminimalisir peran batubara yang mendominasi secara nasional dan mendukung sasaran bauran EBT tahun 2025 agar tercapai. Kemudian Pengembangan biomassa juga akan dimaksimalkan dengan sumbernya yang berasal dari sampah dan pelet biomassa tanaman energi yang mana salah satu sumbernya yaitu berasal dari kelapa sawit. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan program mandatori pencampuran 70% solar dengan 30% biodiesel (Program B30).

5. KESIMPULAN

Saat ini Indonesia termasuk negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dikarenakan kondisi geografisnya yang cocok ditumbuhi tanaman tersebut. Indonesia juga merupakan pengeksport CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Kebanyakan hasil dari produksi CPO tersebut diekspor ke beberapa negara besar di dunia seperti China, India, dan Uni Eropa. Namun pada saat ini Indonesia justru harus mengalami permasalahan ekspor CPO ke salah satu negara yang menjadi pasar ekspor terbesarnya yaitu Uni Eropa.

Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*) yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai energy terbarukan. Hal tersebut terjadi karena Uni Eropa menganggap bahwasannya kelapa sawit menjadi salah satu penyebab kerusakan di muka bumi. Dikarenakan Indonesia menjadi produsen sekaligus pemasok CPO terbesar di dunia, banyak negara yang merasa terintimidasi oleh CPO Indonesia yang membuat Indonesia menjadi sorotan dan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Uni Eropa. (Pranggadia L.A, 2021). Uni Eropamelakukan *Black Campaign* (Kampanye Hitam) melalui berbagai media massa dengan mengatakan bahwasannya CPO tidak ramah lingkungan dan penyebab sebagian besar kerusakan bumi. Alasan Uni Eropa melakukan hal tersebut dikarenakan anggapan bahwasannya kelapa sawit diproduksi dengan tidak memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan. Namun selain itu hal tersebut diyakini karena adanya persaingan dagang yang tidak ingin minyak kelapa sawit lebih berkembang dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh Uni Eropa sendiri seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, dsb.

Namun dengan adanya kebijakan tersebut Indonesia tidak hanya tinggal diam, akan tetapi berusaha bagaimana agar CPO Indonesia bisa tetap masuk ke pasar Eropa. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan melalui diplomasi komersial atau diplomasi perdagangan. Diplomasi komersial mengedepankan usaha negosiasi dengan negara mitra terkait perdagangan suatu produk dengan tujuan ntuk mempertahankan kepentingan- kepentingan dengan tidak menggunakan kekerasan, propaganda, dan juga hukum. Diplomasi komersial merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melobi Uni Eropa dengan melakukan berbagai langkah yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan perdagangan seperti kerjasama perdagangan, hadir dan ikut serta dalam pertemuan internasional yang resmi untuk proses negosiasi, konsultasi perdagangan, maupun penyelesaian hambatan. Kemudian dari kegiatan-kegiatan pendukung bisnis seperti kegiatan memperkenalkan perdagangan melalui kontribusi dalam pameran dagang, seminar, dan melakukan propaganda promosi untuk menciptakan citra positif negara. Uni Eropa menganggap minyak kelapa sawit tidak memenuhi kriteria bahan baku biofuel Eropa yang menyebabkan penggundulan hutan, menghasilkan kadar karbon tinggi serta penuh biodiversitas atau bukan daerah bernilai alam tinggi. Beberapa alasan tersebut dianggap telah cukup oleh Uni Eropa untuk menghapus minyak kelapa sawit dari bahan baku biofuel. Namun Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia mengkritik keras kebijakan yaang dilakukan oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut tentunya akan mengurangi serta menjadi penghambat produksi dan perdagangan pasar minyak kelapa sawit. Negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia tentunya akan cemas karena akan kehilangan salah satu pasar terbesar komoditas minyak kelapa sawit. Apalagi kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa yaitu :

1. Berperan aktif dalam KTT seperti perundingan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA), melakukan pertemuan tingkat menteri ASEAN-UE ke 23 diadakan secara online pada Desember 2020, serta upaya melalui WTO.
2. Ekspansi dan promosi seperti mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan oleh PT Paya Pinang dengan menerima kunjungan Dubes Jerman untuk Indonesia di bulan Februari 2018. Kementerian Luar Negeri bersama perusahaan kelapa sawit Asian Agri melaksanakan Program Eksekutif Kelapa Sawit pada 16 sampai 18 April 2019 dalam rangka menyambut kunjungan resmi Duta Besar beberapa negara anggota Uni Eropa, promosi ISPO dalam pertunjukan Warsawa Humanitarian Polandia yang bertujuan untuk menyampaikan kepada publik bahwa CPO berkelanjutan Indonesia dapat mendukung tercapainya SDGs, promosi kelapa sawit berkelanjutan ISPO dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Perwakilan Uni Eropa di Jakarta, melakukan kampanye bersama (*joint campaign*) oleh produsen minyak sawit terbesar di dunia sebagaimana Indonesia juga Malaysia dalam mengganti pandangan negatif Eropa terhadap minyak sawit.
3. Meningkatkan kerjasama melalui JWG seperti Melaksanakan pertemuan resmi *Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* yang terdiri atas negara Indonesia, Malaysia, dan Kolombia. Kemudian kerjasama dengan Belanda terkait produksi

sawit berkelanjutan, kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI dengan Uni Eropa yang dilakukan pada 13 April 2018 di Brussels, Belgia. Menko Kemaritiman melakukan kunjungan kenegaraan ke Vatikan dalam rangka melakukan kesepakatan pembatasan perdagangan CPO ke Eropa dan meminta bantuan agar CPO tidak terhambat masuk ke pasar Eropa. Perjanjian dagang minyak kelapa sawit Indonesia dengan Swiss, dan lobi pemerintah Indonesia terhadap APEC.

Dengan adanya kebijakan RED II yang dilakukan oleh Uni Eropa tentu berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia. Namun hal tersebut membuat Indonesia tidak hanya tinggal diam, namun mencari solusi dengan mencari pasar baru agar ekspor kelapa sawit Indonesia tetap berlangsung, salah satu pasar yang menjadi tujuan Indonesia adalah negara-negara di benua Afrika dan Asia.

Dalam perdagangan internasional bisa saja terdapat konflik ataupun perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari masing-masing negara. Misalnya seperti sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait CPO yang mana Uni Eropa membuat kebijakan RED II yang berisi pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit dikarenakan mereka menganggap bahwasannya minyak kelapa sawit merupakan salah satu penyebab kerusakan di muka bumi. Namun Indonesia membantah hal tersebut dengan melakukan upaya diplomasi untuk mencari jalan tengah dari permasalahan tersebut. Namun hasil dari upaya tersebut masih belum maksimal dikarenakan jumlah ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa masih mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai 2022. Penulis berharap Indonesia harus lebih ekstra dalam melakukan promosi serta diplomasi komersial terkait CPO agar jumlah ekspornya kembali mengalami peningkatan.

Penulis juga berharap agar Indonesia mencari pasar baru selain Uni Eropa untuk memasarkan komoditas CPO agar tidak hanya ketergantungan dengan pasar di Uni Eropa saja. Penulis berharap penelitian ke depannya penelitian terkait diplomasi komersial Indonesia dengan Uni Eropa terkait CPO dapat lebih dieksplor dan memiliki analisis yang lebih konkrit.

REFERENSI

- [1] Nyoman, N., & Lorensia, P. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive. *FISIP Budi Luhur*, 120–131.
- [2] Salim, A. (2019). Kurikulum Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *EduTech:Jurnal IlmuPendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 105–109. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3268>.
- [3] Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 126. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4404>.
- [4] WULANDARI, A. R., & Suryadipura, D. (2021). Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 103. <https://doi.org/10.24198/padjiir.v3i2.33521>.
- [5] Sawit, K. (n.d.). (2022). *Sertifikasi ISPO menuju pembiayaan berkelanjutan*.

- [6] Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 296. <https://doi.org/10.29210/020221377>.
- [7] Nuri Aslami, N. S. A. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i1.358>.
- [8] K. Holding, K. Adolina. (2023). Majalah Internal Nusantara Empat MINAT. Corporate Secretary PT Perkebunan Nusantara IV.
- [9] Immara Nuur Alfianisa. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Merespon RED II. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1271–1285. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.384>.
- [10] Badan Pusat Statistik. (2023). Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2022. Diakses pada 10 Oktober 2023 dari <https://www.bps.go.id/statistable/2014/09/08/1026/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2015.html>.
- [11] Ardiansyah, E., & Dra. Christy Damayanti, M.Si. Drs. GPH Dipokusuma, M. S. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Kampanye Hitam Uni Eropa Tentang Crude Palm Oil (Cpo) Tahun 2014 - 2018. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- [12] Pradhana, M. A. (2020). Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Journal of International Relations*, 6(4), 525–534.
- [13] Pranggadia L.A, V. (2021). upaya Presiden Jokowi Dodo dalam menghadapi penolakan ekspor komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Pada Tahun 2017-2020. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 110–131. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.28>.
- [14] Wikansari, R., Febriana, B., & Qamarani, Q. Q. (n.d.). KONDISI EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA SELAMA PERIODE COVID-19. 06(02), 31–42.
- [15] Putri, S. Y. (2020). Diplomasi Komersial Jepang Ke Indonesia Melalui Perusahaan Multinasional Jepang Di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 4(2), 151. <https://doi.org/10.22303/pir.4.2.2020.151-165>.
- [16] Pratiwi, C. A. (2021). Kerja Sama Bilateral Indonesia Denmark Dalam Circular Economy Dan Manajemen. *Moestopo Journal International Relations (MJIR)*, 1(2), 127–136.
- [17] Avivi, Y., & Siagian, M. (2020). Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 49–61. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>.
- [18] Permatasari, Y. (2022). Perberhentian Impor Kelapa Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Dalam Perspektif

Ekonomi Politik (National Interest). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 56–61.

- [19] Triantama, F. (2020). Interdependensi Ekonomi Sebagai Pencipta Perdamaian Asia Timur. *Jurnal Dinamika Global*, 5(02), 278–298. <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.195>.
- [20] Dewani, N. S. (2023). Analisis Diplomasi Minyak Indonesia Ke Italia. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(1), 48–60. <https://doi.org/10.51747/publicio.v5i1.1213>.